

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Transparansi adalah masalah utama dalam pemerintahan yang demokratis. Tata pemerintahan yang demokratis membutuhkan akuntabilitas kepada publik untuk meningkatkan transparansi dalam mengungkapkan dan kemudahan masyarakat mengakses lebih banyak informasi tentang anggaran dan keuangan pemerintah daerah. Adapun transparansi keuangan dan kinerja dapat dilakukan melalui website sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Menurut Puspita dan Martani (2012) alasan pentingnya transparansi keuangan dan kinerja melalui website karena biaya yang relatif lebih murah ketika menggunakan teknologi serta kemudahan tingkat aktivitas entitas ekonomi dibanding ketika dilakukan dengan manual dan konvensional. Menurut West (2005) buku tentang *Technology and Public Sector Performance*, lebih dari 19% organisasi pemerintah di seluruh dunia telah mengadopsi e-government dengan tingkatan berbeda. Selain itu, hasil riset menunjukkan bahwa salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah adalah publikasi laporan keuangan di internet (Laswad dkk., 2005), sehingga dapat dipahami bahwa website adalah media yang memadai bagi peningkatan transparansi sangat dibutuhkan dalam konteks fungsi pengawasan, mencegah tindakan yang akan mengakibatkan gangguan pada kebijakan, pengelolaan anggaran, pengelolaan asset, dan pengadaan barang dan jasa.

Pada tahun 2019, Jawa Timur menjadi provinsi dengan OTT (Operasi Tangkap Tangan) terbanyak di Indonesia dengan 85 kasus korupsi (KUPASTUNTAS.2019) Banyaknya kasus korupsi yang dilakukan oleh oknum pejabat negara ini menyebabkan *trust issue* atau berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Langkah preventif yang dapat dilakukan untuk mengembalikan atau minimal memperbaiki *trust issue* masyarakat kepada kinerja pemerintah adalah dengan melakukan transparansi laporan keuangan serta dalam rangka menindak lanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 188-52/1797/SJ/2012 (Republik Indonesia, 2012) tentang peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah dan (Peraturan

Pemerintah / PP) Nomor 56/2005 (Republik Indonesia, 2005b) dalam Pasal 13 (b) peraturan pemerintah menyatakan bahwa informasi keuangan daerah harus disajikan melalui situs resmi pemerintah daerah. Dengan melakukan transparansi kepada masyarakat melalui website, pemerintahan harus ada inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik agar proses penyelenggaraan pelayanan publik yang dimaksud menjadi lebih efisien, efektif, transparan, dan akuntabel dan diharapkan akan menciptakan lingkungan pemerintahan yang sehat dan jujur dalam pengelolaan anggaran, aset dan barang dan jasa.

Pemerintah daerah adalah pihak yang diberi mandat untuk mengelola dana dari masyarakat, sehingga keberhasilan atau kegagalan pengelolaan dana sangat tergantung pada lembaga pemerintah daerah yang mengimplementasikannya (Adisasmita, 2011). Pengelolaan dana dilakukan melalui penyusunan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah. Setiap pemerintah daerah wajib membuat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) seperti di sampaikan dalam UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Penyusunan LKPD dan di publikasi di website merupakan salah satu bentuk transparansi kepada masyarakat. Banyak faktor yang memengaruhi sebuah entitas sesegera atau lambat mengadopsi *e-government* dan transparansi atau tidak dalam menginformasikan laporan keuangan. Pendidikan melalui jalur akademis dipercaya sebagai media yang dapat membentuk pola pikir, membuka wawasan, dan menciptakan kepekaan terhadap suatu masalah. Tingkat pendidikan bagi seorang walikota/bupati sangat penting, karena kemampuan seorang pemimpin sangat mempengaruhi keberhasilan kinerja di dalam suatu organisasi. Seseorang yang menempuh pendidikan formal dengan dasar pengetahuan, teori, logika, kemampuan, analisis, serta mengembangkan karakter dan kepribadian akan lebih rasional dalam berpikir, bertindak dan mengambil keputusan serta bertanggung jawab yang dibebankan dengan baik. (Meuthia, 2008).

Tingkat pendidikan di Indonesia sebagai syarat minimal menjadi walikota/bupati adalah *sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat* yang diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dalam beberapa tahun terakhir banyak calon maupun pemimpin daerah

yang mengedepankan popularitas seperti halnya berlatar belakang profesi sebagai artis. Dari fenomena ini, terlihat bahwa popularitas menjadi modal untuk menjadi calon bupati/wali kota. Disisi lain, calon pemimpin harus memiliki latar belakang pendidikan, pengalaman, serta integritas yang tinggi, bukan hanya dari popularitas seorang calon saja. Hal ini dikarena menjadi pemimpin memiliki tanggung jawab yang besar dalam mengelola suatu daerah mulai dari perencanaan hingga pelaporan. Semakin tinggi strata pendidikan yang ditempuh oleh walikota/bupati suatu daerah, akan terbentuk pola pikir dan wawasan yang semakin luas, dan kepekaan terhadap masalah daerah yang dipimpinnya. Pendidikan dapat meningkatkan kualitas, semakin tinggi pendidikan yang ditempuh akan memiliki pengalaman intelektual yang tinggi dimana pengalaman intelektual akan mempermudah kinerja dan berdampak pada prestasi kerja yang lebih baik (Saputra, 2002). Seseorang yang menempuh pendidikan formal dengan dasar pengetahuan, teori, logika, kemampuan, analisis, serta pengembangan karakter dan kepribadian akan lebih rasional dalam berpikir, bertindak dan mengambil keputusan serta bertanggungjawab (Meuthia, 2008). Menurut Fardian (2014) tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap transparansi.

Ukuran pemerintah Daerah ditandai dengan besarnya aset yang dimiliki suatu daerah. Aset dapat mewakili seberapa besar pemerintahan, semakin besar aset maka semakin banyak modal yang ditanam (Nosihana dan Yaya, 2016). Aset merupakan jumlah sumber daya yang dimiliki suatu entitas untuk melakukan kegiatan operasional entitas tersebut. Ukuran pemerintah daerah salah satunya dapat dinilai dari asset, menunjukkan jumlah aset yang dimiliki dan ditangani oleh pemda, semakin besar aset yang ditangani dan dimiliki maka semakin besar tanggungjawab dan pelaporan terhadap transparansi. Semakin besar jumlah aset maka semakin besar sumber daya yang bisa digunakan untuk melakukan pengungkapan yang lebih besar Hendriyani dan Tahar (2015).

Opini audit adalah karakteristik atau gambaran praktik dan hasil audit berdasarkan standar auditing dan standar pengendalian mutu yang menjadi ukuran pelaksanaan tugas dan tanggung jawab profesi seorang auditor. Kualitas audit berhubungan dengan seberapa baik sebuah pekerjaan diselesaikan dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan. Menurut Watkins dkk. (2004) kualitas audit

adalah kemungkinan dimana auditor akan menemukan dan melaporkan salah saji material dalam laporan keuangan klien. Berdasarkan Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP) audit yang dilaksanakan auditor dikatakan berkualitas baik, jika memenuhi ketentuan atau standar pengauditan. Menurut Lee dkk. (1999) kualitas audit adalah probabilitas bahwa auditor tidak akan melaporkan laporan audit dengan opini wajar tanpa pengecualian untuk laporan keuangan yang mengandung kekeliruan material. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh tingkat pendidikan walikota/bupati, ukuran pemerintah daerah, dan opini audit terhadap transparansi laporan keuangan pemerintah daerah di Jawa Timur melalui website.

Keterkaitan antara tingkat pendidikan walikota/bupati dengan transparansi laporan keuangan pemerintah daerah adalah dengan memiliki pemimpin dengan pendidikan yang semakin tinggi, pengalaman, dan integritas tinggi dapat mempengaruhi kinerja pengambilan keputusan yang tepat mulai mengatur, perencanaan, dan membuat laporan kinerja maupun keuangan yang dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan. Ukuran pemerintah dengan transparansi laporan keuangan pemerintah daerah adalah ketika ukuran pemerintah daerah salah satunya diukur dari total aset yang dimiliki, maka pemerintah daerah wajib memepertanggung jawabkan aset yang dimiliki dan di pergunakan selama periode tertentu pada publik. Semakin besar aset yang di miliki maka seharusnya pertanggung jawaban semakin besar dalam pelaporan melalui transparansi. Dari hasil opini audit IHSP BPK RI, yang baik akan mendapatkan penilaian wajar tanpa pengecualian (WTP) yang mengindikasikan laporan tersebut sudah sesuai prosedur pelaporan dan mencerminkan kondisi atau fakta lapangan yang sesungguhnya, sehingga hasil opini audit yang baik akan mendorong pemerintah untuk semakin transparan kepada publik. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh tingkat pendidikan walikota/bupati, ukuran pemda, opini audit terhadap transparansi laporan keuangan pemda di Jawa Timur melalui website tahun 2016-2018. Peneliti menggunakan data penelitian 2016-2018 karena ada kasus OTT tahun 2019, dalam 3 tahun tersebut menurut peneliti menunjukkan sampel praktik kecurangan yang tertangkap pada tahun 2019.

1.2 Kesenjangan Penelitian

Beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang transparansi

pemerintah menghasilkan kesimpulan yang beragam, sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Ningsih (2018) dimana ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif signifikan terhadap aksesibilitas informasi keuangan lokal melalui situs web. Menurut Rahim dan Martani (2016) berkesimpulan bahwa opini audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan transparansi melalui website. Menurut Styles dan Tennyson (2007) berkesimpulan bahwa ukuran pemerintah berpengaruh signifikan terhadap transparansi. Menurut Fardian (2014) berkesimpulan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap transparansi.

Menurut Nainggolan dan Purwanti (2016) berkesimpulan bahwa ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap transparansi informasi laporan keuangan melalui website. Menurut Trisnawati dan Achmad (2013) berkesimpulan menunjukkan bahwa opini audit tidak berpengaruh pada publikasi laporan keuangan pemerintah daerah melalui internet. Menurut Ningsih (2018) berkesimpulan bahwa opini audit tidak berpengaruh terhadap transparansi. Menurut Rahmawati dan Mahmudi (2016) berkesimpulan opini audit tidak berpengaruh terhadap transparansi. Menurut Rahmawati dan Mahmudi (2016) berkesimpulan bahwa tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap transparansi. Menurut Putra (2016) berkesimpulan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap transparansi.

Selain perbedaan hasil penelitian, berbagai subjek, objek, dan sumber data penelitian yang dapat diolah menjadi peluang untuk perkembangan penelitian tentang pokok bahasan ini. Perbedaan subjek, objek, dan sumber data dapat digunakan untuk membandingkan masing-masing hasil penelitian untuk menindak lanjuti kesimpulan penelitian yang ada agar ditemukan kesimpulan korehensip atas permasalahan yang muncul.

1.3 Tujuan Penelitian

Bermula dari latar belakang yang dimunculkan dan kesenjangan penelitian yang ada, tujuan penelitian ini sebagai berikut.

1. Mendapatkan bukti empiris pengaruh tingkat pendidikan walikota/bupati terhadap transparansi laporan keuangan pemerintah daerah di Jawa Timur melalui website.

2. Mendapatkan bukti empiris pengaruh ukuran pemerintah daerah terhadap transparansi laporan keuangan pemerintah daerah di Jawa Timur melalui website.
3. Mendapatkan bukti empiris pengaruh opini audit pemerintah daerah terhadap transparansi laporan keuangan pemerintah daerah di Jawa Timur melalui website.

1.4 Ringkasan Metode Penelitian

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini memakai pendekatan kuantitatif. Variabel-variabel yang digunakan adalah transparansi laporan keuangan pemda melalui ketersediaan laporan keuangan di website sebagai variabel terikat, lalu tingkat pendidikan walikota/bupati, ukuran pemerintah daerah dan opini audit sebagai variabel bebas. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang meliputi, tingkat pendidikan walikota dan bupati melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pemerintah provinsi Jawa Timur, total aset melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kemenkeu dan hasil opini audit yang diperoleh melalui IHSP BPK RI pemerintah daerah kabupaten dan kota di Jawa Timur tahun 2016-2018. Metode analisis penelitian yaitu analisis statistika deskriptif dan analisis regresi logistik multinomial.

1.5 Ringkasan Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan sampel yang diperoleh melalui metode purposive sampling sebanyak 38 pengamatan. Analisis statistika deskriptif menunjukkan deskripsi variabel ukuran pemda melalui nilai rata-rata, minimum, maksimum, dan median. Hasil penelitian dengan regresi logistik multinomial menunjukkan bahwa variabel opini audit tidak berpengaruh terhadap transparansi laporan keuangan pemda di Jawa Timur, sedangkan tingkat pendidikan walikota/bupati dan ukuran pemda berpengaruh positif secara signifikan terhadap transparansi laporan keuangan pemda di Jawa Timur melalui website dengan model regresi logistik multinomial.

$$1. Ln = \frac{P(1)}{P(0)} = 22,672 - 1,563 \text{ tgkt.pend} - 0,780 \text{ uk.pemda} - 1,344 \text{ op.audit}$$

$$2. Ln = \frac{P(2)}{P(0)} = -26,712 - 1,821 \text{ tgkt. pend} + 0,902 \text{ uk. pemma} \\ - 0,916 \text{ op. audit}$$

1.6 Kontribusi Riset

Penelitian ini dimaksudkan mampu memberikan kontribusi kepada seluruh elemen masyarakat, diantaranya sebagai berikut.

1. Kontribusi Teoritis

Sebagai kajian untuk mendapatkan pandangan, wawasan, dan pengetahuan mengenai transparansi pemerintah daerah di Indonesia, khususnya kabupaten/kota di Jawa Timur serta sebagai bahan acuan penelitian mengenai topik bahasan serupa.

2. Kontribusi Praktis

a. Bagi Pemerintah

Sebagai rujukan dalam menyusun cara penanganan transparansi yang benar serta patuh terhadap regulasi yang ada.

b. Bagi Badan Pemeriksa Keuangan

Sebagai refleksi dan evaluasi atas produk yang dihasilkan untuk dapat meningkatkan kualitas audit pemerintah.

1.7 Sistematika Penulisan

Perumusan sistematika penulisan ini mempunyai tujuan untuk menuntun dalam menulis dan memahami keseluruhan penulisan skripsi ini. Sistematika penulisan penelitian ini yaitu sebagai berikut.

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang masalah transparansi laporan keuangan pemda di Jawa Timur melalui website, kesenjangan penelitian yang muncul terkait pokok bahasan penelitian, serta tujuan penelitian yaitu mendapatkan bukti empiris pengaruh positif tingkat pendidikan walikota/bupati, ukuran pemerintah daerah dan opini audit terhadap transparansi laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten dan kota di Jawa Timur. Bab ini juga menjelaskan kontribusi dari riset yang dilaksanakan, ringkasan metode dan hasil penelitian beserta penjabaran sistematika penulisan skripsi.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menyampaikan landasan teori yang dijadikan sebagai rujukan dan acuan dalam penelitian yang terdiri dari teori *stewardship*, teori sinyal, transparansi, tingkat pendidikan, ukuran pemda, opini audit, serta peraturan yang berlaku. Kemudian terdapat beberapa uraian penelitian terdahulu untuk mendukung pengembangan hipotesis yang menjadi jawaban sementara dari penelitian ini berdasarkan kerangka konseptual penelitian.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Bab ini memaparkan pendekatan penelitian kuantitatif, penjelasan definisi operasional variabel terikat yaitu transparansi laporan keuangan pemda di Jawa Timur serta definisi variabel bebas yaitu tingkat pendidikan walikota/bupati, ukuran pemda dan opini audit. Adapun jenis dan sumber data yang digunakan, metode pengumpulan data dengan studi pustaka, populasi dan sampel disertai dengan metode dan beberapa syaratnya, disajikan pula dalam bab ini. Penjelasan metode analisis data yang digunakan yang meliputi statistika deskriptif dan analisis regresi logistik multinomial dimuat dalam bab ini.

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan gambaran umum hasil penelitian disertai dengan analisis deskriptif dimana rata-rata jumlah aset meningkat dari tahun ke tahun. Adapun pembuktian pengujian hipotesis membuktikan bahwa opini audit tidak berpengaruh terhadap transparansi laporan keuangan pemda di Jawa Timur melalui website. Sedangkan variabel tingkat pendidikan walikota/bupati dan ukuran pemda berpengaruh positif secara signifikan terhadap transparansi laporan keuangan pemda di Jawa Timur melalui website.

BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menjabarkan kesimpulan hasil penelitian bahwa variabel opini audit tidak berpengaruh sedangkan variabel tingkat pendidikan walikota/bupati dan ukuran pemda berpengaruh positif secara signifikan terhadap tingkat transparansi laporan keuangan pemda di Jawa Timur melalui website. Adapun saran bagi pemerintah adalah untuk mempertimbangkan perubahan syarat menjadi walikota/bupati setidaknya mempunyai pendidikan minimal S1. Sedangkan saran bagi penelitian selanjutnya adalah menambah variabel lain dan memperluas data, misalnya memperoleh data dari sumber lain selain web resmi atau menggunakan

ukuran lain dalam mempresentasikan variabel opini audit dan ukuran pemda.